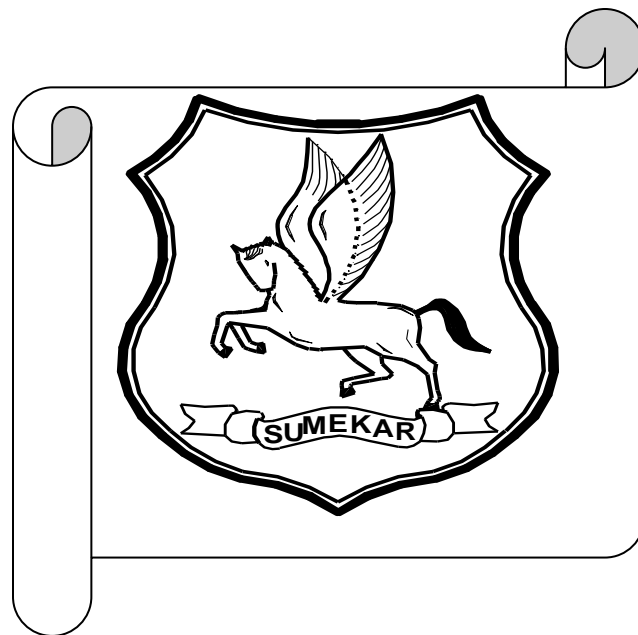


# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat, dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan DPMPTSP Kabupaten Sumenep periode 2022 – 2026, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2026.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari pendapatan tersebut.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

Sumenep, Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMENEP



**Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	64
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	67
2.5 Penelaahan Usulan program Kegiatan Masyarakat .....	76
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	81
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan .....	81
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	82
3.3 Program dan Kegiatan .....	89
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	96
4.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah .....	97
4.2 Prioritas Pembangunan .....	97
4.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	98
BAB V PENUTUP .....	112

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2024 .....	13
Tabel 2.2	Belanja Langsung TA.2024 .....	15
Tabel 2.3	Realisasi Program dan Kegiatan .....	19
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Sumenep .....	33
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep .....	49
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sumenep .....	69
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sumenep .....	76
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran RENSTRA .....	83
Tabel 3.2.2	Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah .....	85
Tabel 3.2.3	Tujuan Perangkat Daerah .....	86
Tabel 3.2.4	Sasaran Perangkat Daerah .....	87
Tabel 3.2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	88
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Sumenep .....	90
Tabel 4.1	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Target Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2024 .....	97
Tabel 4.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan daerah dengan Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 .....	98
Tabel 4.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	99
Tabel 4.3.1	Sasaran dan Program Kegiatan .....	101
Tabel 4.3.2	Rekapitulasi Program Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 .....	103
Tabel 4.3.3	Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif .....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2026 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Ser E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
26. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Pendelegasian Kewenangan Perizinan atas Perbup Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2026 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2026.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penulisan renja OPD adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

#### **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan dan garis besar isi dokumen

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (Tahun 2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan

(Tahun 2026), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tujuan dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

- a. Berisikan mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

## **2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT**

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

#### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep (RENJA OPD) adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep itu sendiri. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026.

#### ***2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.***

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada tahun 2024. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

terdiri dari 5 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dengan 30 (tiga puluh) sub kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 93,19% (per 31 Desember 2024).

Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024, sebagai berikut:

**a. Belanja Gaji dan Tunjangan**

Belanja gaji dan tunjangan, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Belanja gaji dan tunjangan TA. 2024 sebesar **Rp. 4.695.004.462,-** dan realisasinya sebesar **Rp. 4.447.255.850,- (94,72%)** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.1  
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA. 2024

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	Rp4.695.004.462,00	Rp4.447.255.850,00	94,72%
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.695.004.462,00	Rp4.447.255.850,00	94,72%
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp4.695.004.462,00	Rp4.447.255.850,00	94,72%
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.695.004.462,00	Rp4.447.255.850,00	94,72%
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp4.695.004.462,00	Rp4.447.255.850,00	94,72%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.672.720.773,00	Rp2.519.662.554,00	94,27%
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp2.106.317.381,00	Rp2.011.498.595,00	95,50%
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.014.834.724,00	Rp1.947.426.595,00	96,65%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp91.482.657,00	Rp64.072.000,00	70,04%
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp190.725.283,00	Rp184.386.402,00	96,68%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp186.982.426,00	Rp181.182.802,00	96,90%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp3.742.857,00	Rp3.203.600,00	85,59%
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp55.986.525,00	Rp53.010.000,00	94,68%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp55.986.525,00	Rp53.010.000,00	94,68%
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp160.561.117,00	Rp119.690.000,00	74,54%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp160.561.117,00	Rp119.690.000,00	74,54%
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp50.285.949,00	Rp47.385.000,00	94,23%

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp45.122.888,00	Rp43.685.000,00	96,81%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp5.163.061,00	Rp3.700.000,00	71,66%
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp103.693.243,00	Rp99.867.180,00	96,31%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp101.162.774,00	Rp97.694.580,00	96,57%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp2.530.469,00	Rp2.172.600,00	85,86%
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp5.111.951,00	Rp3.799.322,00	74,32%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp5.111.951,00	Rp3.799.322,00	74,32%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp32.921,00	Rp25.057,00	76,11%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp6.403,00	Rp998,00	15,59%
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp1.916.028.689,00	Rp1.832.868.296,00	95,66%
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp516.500.626,00	Rp488.012.210,00	94,48%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp516.500.626,00	Rp488.012.210,00	94,48%
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp460.052.196,00	Rp446.573.534,00	97,07%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp460.052.196,00	Rp446.573.534,00	97,07%
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp939.475.867,00	Rp898.282.552,00	95,62%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp939.475.867,00	Rp898.282.552,00	95,62%
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp106.255.000,00	Rp94.725.000,00	89,15%
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp106.255.000,00	Rp94.725.000,00	89,15%
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp106.255.000,00	Rp94.725.000,00	89,15%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp4.695.004.462,00</b>	<b>Rp4.447.255.850,00</b>	<b>94,72%</b>

## b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 2 komponen, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 (empat) Program dan 4 (empat) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.037.618.788,-** realisasi belanja **Rp. 895.363.441,- (86,29%)**
2. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Program dan 6 (enam) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 5.888.164.561,-** realisasi belanja **Rp. 5.558.726.944,- (94,41%)**.

Tabel 2.1.2  
Belanja Daerah TA. 2024

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	Rp 6.925.783.349	Rp 6.454.090.385	93,19%
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 6.925.783.349	Rp 6.454.090.385	93,19%
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Rp 6.925.783.349	Rp 6.454.090.385	93,19%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.888.164.561	Rp 5.558.726.944	94,41%
2.18.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp2.808.200,00</i>	<i>Rp2.766.700,00</i>	<i>98,52%</i>
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp1.680.000,00	Rp1.638.700,00	97,54%
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp545.000,00	Rp545.000,00	100,00%
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp583.200,00	Rp583.000,00	99,97%
2.18.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp4.695.004.462,00</i>	<i>Rp4.447.255.850,00</i>	<i>94,72%</i>
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.695.004.462,00	Rp4.447.255.850,00	94,72%
2.18.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Rp36.230.400,00</i>	<i>Rp36.208.832,00</i>	<i>99,94%</i>
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp36.230.400,00	Rp36.208.832,00	99,94%

<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp156.225.400,00</b>	<b>Rp152.293.612,00</b>	<b>97,48%</b>
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.209.200,00	Rp5.172.500,00	99,30%
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp3.376.500,00	Rp2.856.500,00	84,60%
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp58.372.400,00	Rp57.737.662,00	98,91%
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp6.483.400,00	Rp6.417.400,00	98,98%
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.536.000,00	Rp3.370.000,00	74,29%
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp64.112.000,00	Rp62.806.800,00	97,96%
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp14.135.900,00	Rp13.932.750,00	98,56%
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp284.433.393,00</b>	<b>Rp271.945.197,00</b>	<b>95,61%</b>
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp37.573.500,00	Rp29.800.000,00	79,31%
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp24.574.734,00	Rp21.809.292,00	88,75%
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp222.285.159,00	Rp220.335.905,00	99,12%
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp558.720.332,00</b>	<b>Rp497.826.043,00</b>	<b>89,10%</b>
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.215.400,00	Rp2.192.475,00	98,97%
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp233.561.712,00	Rp172.690.408,00	73,94%
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp322.943.220,00	Rp322.943.160,00	100,00%
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp154.742.374,00</b>	<b>Rp150.430.710,00</b>	<b>97,21%</b>
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp61.354.000,00	Rp57.273.384,00	93,35%
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp19.080.000,00	Rp18.876.011,00	98,93%
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp74.308.374,00	Rp74.281.315,00	99,96%

<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp150.004.000,00</b>	<b>Rp141.832.872,00</b>	<b>94,55%</b>
<b>2.18.03.2.01</b>	<b><i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi</i></b>	<b><i>Rp150.004.000,00</i></b>	<b><i>Rp141.832.872,00</i></b>	<b><i>94,55%</i></b>
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp150.004.000,00	Rp141.832.872,00	94,55%
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp259.725.582,00</b>	<b>Rp235.398.532,50</b>	<b>90,63%</b>
<b>2.18.04.2.01</b>	<b><i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i></b>	<b><i>Rp259.725.582,00</i></b>	<b><i>Rp235.398.532,50</i></b>	<b><i>90,63%</i></b>
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp144.314.800,00	Rp138.199.252,50	95,76%
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp15.410.900,00	Rp13.651.500,00	88,58%
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp99.999.882,00	Rp83.547.780,00	83,55%
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp607.892.506,00</b>	<b>Rp498.541.336,00</b>	<b>82,01%</b>
<b>2.18.05.2.01</b>	<b><i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Rp607.892.506,00</i></b>	<b><i>Rp498.541.336,00</i></b>	<b><i>82,01%</i></b>
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp72.688.196,00	Rp63.005.400,00	86,68%
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp308.015.510,00	Rp251.064.566,00	81,51%
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Rp227.188.800,00	Rp184.471.370,00	81,20%
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp19.996.700,00</b>	<b>Rp19.590.700,00</b>	<b>97,97%</b>
<b>2.18.06.2.01</b>	<b><i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Rp19.996.700,00</i></b>	<b><i>Rp19.590.700,00</i></b>	<b><i>97,97%</i></b>

2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp19.996.700,00	Rp19.590.700,00	97,97%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp6.925.783.349,00</b>	<b>Rp6.454.090.384,50</b>	<b>93,19%</b>

Tabel 2.1.3  
 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan/lanjutan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	BIDANG PENANAMAN MODAL										
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100			5.888.164.561	5.558.726.944			
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100			2.808.200	2.766.700			
		1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	1.680.000	1.638.700		
		2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	545.000	545.000		

		3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	4	583.200	583.000		
	2		<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	laporan			4.695.004.462	4.447.255.850		
		1	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	orang	40	34	4.695.004.462	4.447.255.850		
	3		<i>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</i>	layanan			36.230.400	36.208.832		
		1	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan atribut yang disediakan	paket	64	64	36.230.400	36.208.832		
	4		<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	unit			156.225.400	152.293.612		
		1	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	26	26	5.209.200	5.172.500		
		2	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	3.376.500	2.856.500		
		3	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	58.372.400	57.737.662		

		4	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	paket	5	5	6.483.400	6.417.400			
		5	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	365	365	4.536.000	3.370.000			
		6	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	131	131	64.112.000	62.806.800			
		7	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	4	4	14.135.900	13.932.750			
	5		<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</i>	<i>unit</i>			284.433.393	271.945.197			
		1	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	unit	1	1	37.573.500	29.800.000	Harga di ekatalog sudah mengalami kenaikan, sehingga pagu anggaran tidak mencukupi dengan pajak	Mencari harga di ekatalog yang sesuai dengan dengan pajaknya	
		2	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	paket	4	4	24.574.734	21.809.292			
		3	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8	8	222.285.159	220.335.905			

	6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	layanan			558.720.332	497.826.043	Pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya listrik pada Belanja Listrik dan jaringan internet disediakan setiap tahunnya	Belanja listrik dan internet tetap disesuaikan dengan tagihan bulanan terhadap belanja tersebut
		1	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4111	1941	2.215.400	2.192.475		
		2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	233.561.712	172.690.408	Pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya listrik pada Belanja Listrik dan jaringan internet disediakan setiap tahunnya	Belanja listrik dan internet tetap disesuaikan dengan tagihan bulanan terhadap belanja tersebut
		3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	322.943.220	322.943.160		

	7			<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah</i>	%			154.742.374	150.430.710	<i>Pemeliharaan barang milik daerah disediakan berdasarkan jumlah unit yang dilakukan pemeliharaan baik kendaraan dinas, operasional dan pemeliharaan peralatan kantor</i>	<i>Akan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dan kendaraan dinas jabatan setiap tahunnya</i>
		1		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	37	10	61.354.000	57.273.384	Terdapat sisa belanja BBM kendaraan dinas jabatan, dimana telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional	Akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap bulan terhadap operasional kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional
		2		Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	64	64	19.080.000	18.876.011		
		3		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	74.308.374	74.281.315		
2				<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	%			<b>150.004.000</b>	<b>141.832.872</b>		
		1		<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</i>	media			150.004.000	141.832.872	<i>Terdapat belanja sewa kendaraan yang tidak dapat direalisasikan karena tidak terdapat promosi investasi di provinsi, sehingga belanja tersebut tidak terserap</i>	<i>Akan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan promosi investasi baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi</i>

		1	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	150.004.000	141.832.872	<i>Terdapat belanja sewa kendaraan yang tidak dapat direalisasikan karena tidak terdapat promosi investasi di provinsi, sehingga belanja tersebut tidak terserap</i>	<i>Akan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan promosi investasi baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi</i>
3			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	%			<b>259.725.582</b>	<b>235.398.532</b>		
	1		<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	NIB			259.725.582	235.398.532	<i>Penigkatan NIB yang diterbitkan sangat tinggi dua kali lipat dari target yang ditetapkan, semakin tinggi kesadaran pelaku usaha yang mengurus izin usahanya serta pengaduan yang dilayani</i>	<i>DPMPTSP selalu mendorong kepada pelaku usaha/masyarakat untuk selalu mengurus legalitas kegiatan usahanya melalui Pembinaan dan Pengawasan dan penanganan pengaduan yang cepat teratasi</i>
		1	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha	6400	15.565	144.314.800	138.199.252	Penigkatan NIB yang diterbitkan sangat tinggi dua kali lipat dari target yang ditetapkan, semakin tinggi kesadaran pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	DPMPTSP selalu mendorong kepada pelaku usaha/masyarakat untuk selalu mengurus legalitas kegiatan usahanya melalui Pembinaan dan Pengawasan

		2	Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	12	38	15.410.900	13.651.500	Dari target 12 pengelolaan konsultasi pada tahun 2024, terealisasi 38 konsultasi yang masuk dan dilakukan tindakan lanjut terhadap layanan konsultasi tersebut	Setiap layanan konsultasi langsung ditindaklanjuti dengan pendampingan terhadap pelaku usaha/masyarakat
		3	Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha	27	20	99.999.882	83.547.780	Pemantauan dan evaluasi atas laporan bidang perizinan hanya mengevaluasi terhadap pelaku usaha Non UMK	Pelaksanaan pemantauan selanjutnya akan dilakukan terhadap semua pelaku usaha, baik UMK maupun Non UMK
4			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya</b>	%			<b>607.892.506</b>	<b>498.541.336</b>	<b>Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik lebih banyak menyesuaikan dengan agenda kegiatan yang lain dan sumberdaya dilapangan sangat terbatas serta lokasi dikepulauan</b>	<b>Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik akan dilakukan lebih awal dengan menyesuaikan kondisi dilapangan dan serta daerah kepulauan</b>

	1		<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</i>	<i>pelaku usaha</i>			607.892.506	498.541.336	<b>Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik lebih banyak menyesuaikan dengan agenda kegiatan yang lain dan sumberdaya dilapangan sangat terbatas serta lokasi dikepulauan</b>	<b>Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik akan dilakukan lebih awal dengan menyesuaikan kondisi dilapangan dan serta daerah kepulauan</b>
	1		Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	9	35	72.688.196	63.005.400	Masih terdapat pelaku usaha yang mengalami permasalahan terhadap kegiatan usahanya dan dilakukan pendampingan terhadap permasalahan tersebut, dimana dari target 9 terealisasi 35 kegiatan usaha yang dilakukan pendampingan	Pelaksanaan Bimtek akan dilakukan sinergitas dengan OPD teknis, dimana pelaku usaha yang mengalami permasalahan terhadap kegiatan usahanya dapat terfasilitasi pendampingan dengan bimtek tersebut
	2		Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	287	240	308.015.510	251.064.566	Pelaksanaan Bimtek telah dilaksanakan dengan baik terhadap kepatuhan pelaku usaha akan pelaporan kegiatan usahanya yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha baik UMK maupun Non UMK secara rutin	Akan dilakukan sinergitas dalam pelaksanaan bimtek, selain peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan kegiatan usaha juga pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami permasalahan atas kegiatan usahanya

		3	Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	kegiatan usaha	17	54	227.188.800	184.471.370	Pengawasan penanaman modal dilakukan baik di daratan maupun di kepulauan, terhadap kepatuhan pelaku usaha atas izin usaha yang diterbitkan serta pelaku usaha yang mengalami permasalahan dengan kondisi lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar usahanya, dan masih banyak pelaku usaha yang mengalami hal tersebut dengan realisasi 54 kegiatan usaha	Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha selalu dilaksanakan secara masif dan rutin terhadap kegiatan usaha baik daratan maupun kepulauan
5			<b>Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	%			<b>19.996.700</b>	<b>19.590.700</b>		
	1		<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</i>	%			<i>19.996.700</i>	<i>19.590.700</i>		

		1	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	5	5	19.996.700	19.590.700			
--	--	---	---	--	---------	---	---	------------	------------	--	--	--

## **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025**

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2023 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru, dimana DPMPSTP sudah tidak bergabung lagi dengan Ketenagakerjaan dan telah berdiri sendiri. Dan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 4 (empat) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, sebagaimana terlampir. Alokasi Anggaran untuk tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah sebesar Rp. 6.276.344.331,00. Diharapkan pada tahun 2025 keberhasilan kinerja mencapai 95%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu yaitu sebagai berikut:

### **1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :**

#### **A. Urusan Penanaman Modal**

- a. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan.
- b. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- c. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- d. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- e. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peluang investasi.
- f. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- g. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- h. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- i. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.

- j. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- k. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.

**2. Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :**

- a) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- b) Kurang optimalnya pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan;
- c) Perlunya sinergitas program/kegiatan yang dilaksanakan terhadap program prioritas perangkat daerah sehingga output tepat sasaran;
- d) Kurangnya pengetahuan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dalam rangka pencapaian target program/kegiatan;
- e) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait.

Adapun langkah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian target pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

**1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :**

- A. Urusan Penanaman Modal
  - a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
  - b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
  - c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
  - d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
  - e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.

- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.
- o. Pemantauan dan pengawasan serta identifikasi terhadap pelaku usaha yang sudah memiliki izin sesuai izin usahanya.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Penguasaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.

- v. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal dan kemudahan berusaha serta Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan kondisi terkini dan jumlah layanan.
- w. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- x. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online dan pemberian apresiasi berupa reward bagi pelaku usaha yang rutin melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM.

**2. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :**

- a) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif, dan terpadu;
- b) Pelaksanaan evaluasi kegiatan secara massif dan berkala baik kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan, guna mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap kegiatan tersebut;
- c) Sinergitas antar program/kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan prioritas perangkat daerah agar output tepat sasaran;
- d) Koordinasi antar pelaksana kegiatan dengan tim evaluasi dalam rangka pemenuhan target capaian kegiatan;
- e). Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja SKPD sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel T-C. 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Sumenep**

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan
				Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2 18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>									
2 18 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 18 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggung dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	60	12	12	100,00	12	24	40,00	
2 18 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	3	3	100,00	3	6	40,00	
2 18 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	2	2	100,00	2	4	20,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11					
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	100,00	4	8	40,00	
2	18	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>60</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>40,00</b>	
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	360	40	36	90,00	36	76	21,11	
2	18	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	
2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	846	64	64	100,00	-	64	7,57	
2	18	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>252</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>62,00</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>59,52</b>	
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	132	26	26	100,00	6	32	24,24	

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan
									Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	12	100,00	6	18	30,00	
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	100,00	7	19	31,67	
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16.789	5	5	100,00	2	7	0,04	
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.750	365	365	100,00	3	368	13,38	
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	657	131	131	100,00	136	257	40,64	
2	18	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	4	100,00	12	16	400,00	
2	18	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>382</b>	<b>76</b>	<b>18</b>	<b>23,68</b>	<b>76</b>	<b>146</b>	<b>38,22</b>	
2	18	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	40	1	1	100,00	0	1	2,50	
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	40	4	4	100,00	0	4	10,00	
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	8	8	100,00	2	10	25,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11					
2	18	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>40,00</b>	
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.587	4.111	1.941	47,21	4	4.115	24,83	
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang yang dipelihara</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	185	37	28	100,00	37	74	39,46	
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	322	63	59	93,65	64	127	38,25	
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	2	2	100,00	2	4	40,00	



KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11					
2	18	04	2	01	02	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	61	12	38	316,66	10	22	36,06	
2	18	04	2	01	03	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	134	27	20	74,07	30	57	42,54	
2	18	05				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya</b>	<b>95,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,11</b>	<b>93,00</b>	<b>183,00</b>	<b>192,63</b>	
2	18	05	2	01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</b>	<b>32.060</b>	<b>6.400</b>	<b>15.565</b>	<b>243,20</b>	<b>6.639</b>	<b>13.093</b>	<b>40,67</b>	
2	18	05	2	01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	31	9	35	388,88	-	9	29,03	
2	18	05	2	01	02	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1.451	287	240	83,62	-	287	19,78	

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan
									Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11
2	18	05	2	01	03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	87	17	54	317,65	-	17	19,54	
2	18	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>93</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
2	18	06	2	01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	25	5	5	100,00	5	10	40,00	

## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

### **2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep**

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas “Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, dan 1 (satu) Kepala Sub

Bagian, serta Kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud adalah :
  1. Kelompok JF Substansi Penanaman Modal;
  2. Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 tahun 20223 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

#### **KEPALA DINAS**

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

## **SEKRETARIS**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
  - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
  - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan DPMPTSP;
  - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat Dinas dibantu oleh:

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
  - c. menginventarisasi barang milik negara dan memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi pedalanan dinas;

- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan kewajiban seperti pada pasal 8 dan 9 sebagai berikut :

- (1) Kelompok JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (5) Kelompok JF dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim.
- (8) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan unit

organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

- (9) Ketua Tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok JF dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelompokkan substansi/kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. Kelompok JF Substansi Penanaman Modal, dalam melaksanakan tugas DPMPSTP menyelenggarakan fungsi :
  1. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pembangunan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  2. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
  3. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
  4. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
  5. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  6. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
  7. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  8. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

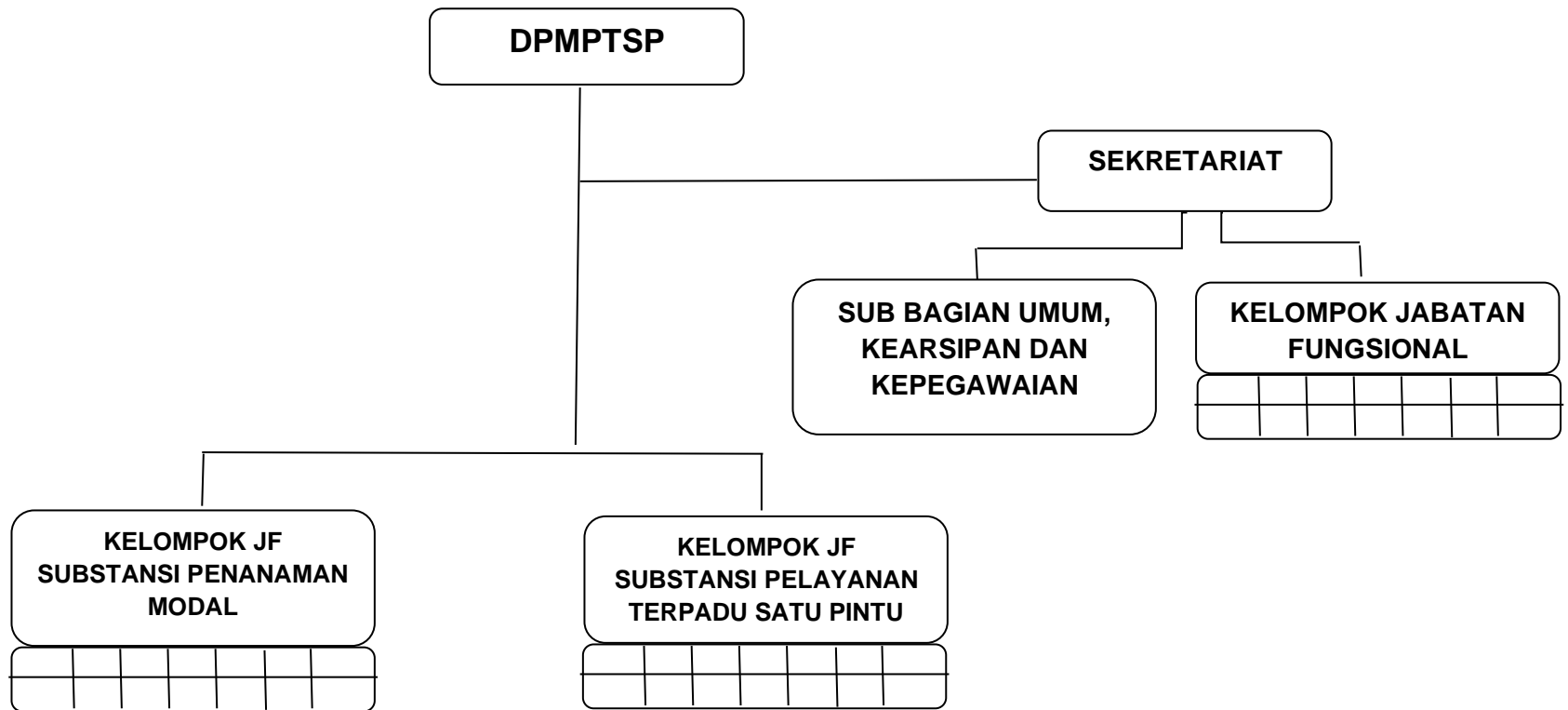
9. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  10. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
  11. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
  12. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu satu Pintu, dalam melaksanakan tugas DPMPSTSP menyelenggarakan fungsi :
1. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  3. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  4. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  5. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
  8. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat,

dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengelompokan substansi/kelompok JF di lingkungan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
  - a. Substansi Program dan Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan dan sumber daya;
  - b. Substansi Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

Lampiran ; Peraturan Bupati Sumenep  
Nomor : 69 Tahun 2023  
Tanggal : 20 Desember 2023

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



\_\_\_\_\_ = Garis Komando

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 telah disediakan SDM melalui draft Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

### **1. Jabatan Struktural**

Untuk mengisi jabatan struktural telah dilantik pejabat struktural sebanyak 6 (enam) pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melalui Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas dengan eselon II-B
2. 1 (satu) Sekretaris dengan eselon III-A
3. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Subbag Umum, Kearsipan dan Kepegawaian setara dengan eselon IV-A

Sudah barang tentu pengisian penjabat struktural tersebut harus mengakomodasi PNS yang memenuhi syarat (kemampuan, senioritas, pendidikan dan kepangkatannya) baik yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, maupun yang berasal dari OPD lainnya.

### **2. Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai tugas dan fungsi, keahlian khusus melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sesuai bidang dan kebutuhan.

Berikut penyajian pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah seperti pada Tabel T-C. 30 sebagai berikut :

Tabel T-C. 30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumenep

NO.	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA/NILAI TARGET/STANDAR (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Sasaran											
1.	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi		3,61	3,67	3,73	3,79	3,85	18,26	30,64	25,00	27,00	
2.	Persentase peningkatan investor		3,61	3,67	3,73	3,79	3,85	120,67	9,53	10,00	12,00	
3.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Perizinan dan Non Perizinan		85	86	88,50	90,50	95	88,25	93,78	95	98	

Pencapaian Kinerja Dapat Disajikan seperti pada Tabel TC-30

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			20,00	20,00			20,00			
2	1801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,00	20,00			20,00			
2	180201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12	12			20,00			
2	18020101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3	2			3			
2	18020102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4	2			2			
2	18020106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4	3			4			
2	180202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	12			12,00			
		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang										

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)						PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN				SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14							
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan			36	36					36				
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun			0	0					0				
2	1	0	2	0	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan kepegawaian yang disediakan</b>			1	5					1				
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai			0	0					0				
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			64	0					64				
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0	0					0				
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0	0					0				
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0					0				
2	1	0	2	0	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>			100	108					62				
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan			26	6					26				

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis
					Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
	Bangunan Kantor	kantor yang disediakan										
2 1 8 0 1 2 0 6 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			12	6			12			
2 1 8 0 1 2 0 6 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			12	7			12			
		jumlah paket item makan dan minum yang disediakan			3	3			3			
2 1 8 0 1 2 0 6 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5	2			5			
2 1 8 0 1 2 0 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			365	1			365			
2 1 8 0 1 2 0 6 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu			0	4			0			
2 1 8 0 1 2 0 6 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			131	136			131			
2 1 8 0 1 2 0 6 0 1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			4	12			4			
2 1 8 0 1 2 0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>			<b>70</b>	<b>85</b>			<b>18</b>			
2 1 8 0 1 2 0 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan			1	0			1			
2 1 8 0 1 2 0 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4	0			4			
2 1 8 0 1 2 0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan diadakan			8	5			8			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
2	1	0	2	0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3</b>	<b>3</b>			<b>3</b>			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.111	4			1.941			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12			12			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	12			12			
2	1	0	2	0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37	14			10			
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Mebel			0	0			0			
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			64	35			64			
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2	3			2			



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis	
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)		Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)		Tahun 2026 (tahun n+1)
1	2					3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14
						SKPD											
2	1	0	2	0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					5	5		5	5		
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1	1		0	1		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					282	282		0	282		
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					3	3		0	3		
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					7	7		0	7		
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					32	32		0	32		
2	1	0	2	0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					53	53		108	52		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					29	29		6	28		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	12		6	12		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12	12		7	12		
						jumlah paket item makan dan minum yang					3	3		3	3		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis
					Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
		disediakan										
2 1 8 0 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					6	6		2	6	
2 1 8 0 1 2 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1	1		1	1	
2 1 8 0 1 2 0 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu					0	0		4	0	
2 1 8 0 1 2 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					143	143		136	136	
2 1 8 0 1 2 0 6 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola					4	4		4	4	
2 1 8 0 1 2 0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>					91	91		82	91	
2 1 8 0 1 2 0 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan					1	1		0	1	
2 1 8 0 1 2 0 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1	1		0	1	
2 1 8 0 1 2 0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan diadakan					9	9		5	9	
2 1 8 0 1 2 0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>					3	3		3	3	
2 1 8 0 1 2 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.722	4.722		4	4.722	
2 1 8 0 1 2 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya					12	12		12	12	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
		Air dan Listrik yang Disediakan										
2	1 8 0 1 2 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12	12		12	12	
2	1 8 0 1 2 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					100	100		100	100	
2	1 8 0 1 2 0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					39	39		14	38	
2	1 8 0 1 2 0 9 5	Pemeliharaan Mebel					90	90		0	88	
2	1 8 0 1 2 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					66	68		35	66	
2	1 8 0 1 2 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2	2		3	2	
		<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>										
2	1 8 0 3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				3,67	3,73			220,66		
2	1 8 0 3 2 0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				5	5			4		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
2 1 8 0 3 2 0 1 0 2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			4	1			2			
2 1 8 0 4		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>3,67</b>	<b>3,73</b>			<b>30,64</b>			
2 1 8 0 4 2 0 1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			6.400	6.639			15.565			
2 1 8 0 4 2 0 1 0 6		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			6.400	6.639			15.565			
2 1 8 0 4 2 0 1 0 7		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			12	10			38			
2 1 8 0 4 2 0 1 0 8		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			27	30			20			
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik										
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari										

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
						Pelaku Usaha										
2	1	0				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			90	90			100,00			
2	1	0	2	0	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.400	6.639			14.211			
2	1	0	2	0	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			9	9			8			
2	1	0	2	0	0	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			287	287			240			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			17	17			101			
2	1	0				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			87	89			90			
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi			100	100			100			



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
2	1 8 4	2	0 0 1 7				15	15		15	10	
2	1 8 4	2	0 0 1 8				32	32		30	30	
2	1 8 5						95	95		90	90	
2	1 8 5	2	0 1				6.890	6.890		6.400	6.639	
2	1 8 5	2	0 0 1 4				10	10		9	8	
2	1 8 5	2	0 1 0				348	348		240	250	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis	
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2026 (akhir renstra)		Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)		Tahun 2026 (tahun n+1)
1	2					3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14
					05	Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko											
2	18	05	2	01	0006	Pengawasan Penanaman Modal					21	21		20	21		
2	18	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>					93	93		92	95		
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100,00	100,00		100,00	100,00		
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					5	5		5	5		



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka tugas pokok DPMPTSP adalah **Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP mempunyai fungsi :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..

- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya sarana promosi publikasi data profil potensi/peleuang investasi yang seharusnya lebih masif dilakukan bagi pelaku usaha besar.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi dan rencana umum penanaman modal.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- m. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- n. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- o. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- p. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- q. Kurangnya daya dukung anggaran terhadap MPP dalam memenuhi kebutuhan kelangsungan pelayanan di Mall Pelayanan Perizinan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting diantaranya:

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peleuang/proyek investasi dan potensi perizinan yang clear and clean.

- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi dan Menyusun RUPM.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.
- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.

- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Penguasaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektivitas serta fasilitasi antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- w. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- x. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- y. Penguasaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online dan memberikan reward kepada pelaku usaha yang

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2026 dibuat berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Pada rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2024 yang pencapaiannya melalui program dan kegiatan dengan melihat hasil evaluasi tahun 2024, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan tahun 2026 yang lebih realistis untuk mencapai target - target tersebut. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel T-C. 31 berikut :

Tabel T-C. 31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kabupaten Sumenep

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.276.344.331	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.276.344.331	
	BELANJA RUTIN				5.762.871.911					5.762.871.911	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00	5.762.871.911	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00	5.762.871.911	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7	2.468.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7	2.468.900	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	1.614.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	1.614.300	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	476.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	476.100	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3	378.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3	378.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	4.826.733.413	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	4.826.733.413	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.826.733.413	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.826.733.413	
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40	151.883.380	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40	151.883.380	
A.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4.998.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4.998.000	
A.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3.954.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3.954.400	
A.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	44.155.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	44.155.000	
			jumlah makan dan minum yang disediakan	3				jumlah makan dan minum yang disediakan	3		
A.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	5.580.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	5.580.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	12.780.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	12.780.000	
A.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	9.996.300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	9.996.300	
A.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142	60.542.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142	60.542.000	
A.3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	9.877.480	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	9.877.480	
A.4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>2</b>	<b>4.815.014</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>2</b>	<b>4.815.014</b>	
A.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	4.815.014	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	4.815.014	
A.5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>3</b>	<b>603.950.692</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>3</b>	<b>603.950.692</b>	
A.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	4.992.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	4.992.100	
A.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	239.909.712	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	239.909.712	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	359.048.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	359.048.880	
A.6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>173.020.512</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>173.020.512</b>	
A.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	58.895.080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	58.895.080	
A.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	14.210.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	14.210.000	
A.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	99.915.432	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	99.915.432	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>513.472.420</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>513.472.420</b>	
	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU</b>				<b>513.472.420</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU</b>				<b>513.472.420</b>	
II	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>3,79</b>	<b>104.427.100</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>3,79</b>	<b>104.427.100</b>	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3</b>	<b>104.427.100</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3</b>	<b>104.427.100</b>	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional /Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	104.427.100	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional /Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	104.427.100	
III	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	<b>3,79</b>	<b>289.264.320</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	<b>3,79</b>	<b>289.264.320</b>	
III.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</b>	<b>6.890</b>	<b>289.264.320</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</b>	<b>6.890</b>	<b>289.264.320</b>	
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.890	178.296.920	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.890	178.296.920	
III.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	15	14.967.700	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	15	14.967.700	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Elektronik					Elektronik			
III.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	7	95.999.700	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	7	95.999.700	
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya</b>	<b>6.890</b>	<b>100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya</b>	<b>6.890</b>	<b>100.000.000</b>	
IV.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</b>	<b>6.890</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</b>	<b>6.890</b>	<b>100.000.000</b>	
IV.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Sumenep	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	20.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Sumenep	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	20.000.000	
IV.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	30	50.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	30	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
IV.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10	30.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10	30.000.000	
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>93,00</b>	<b>19.781.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>93,00</b>	<b>19.781.000</b>	
V.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>100,00</b>	<b>19.781.000</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>100,00</b>	<b>19.781.000</b>	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	19.781.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	19.781.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>JUMLAH PAGU INDIKATIF</b>					<b>6.276.344.331</b>	<b>JUMLAH KEBUTUHAN DANA</b>					<b>6.276.344.331</b>

## 2.5. Penelahaan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Urusan Penanaman dan pelayanan terpadu satu pintiu dalam katagori Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Program dan Kegiatan DPMPSTP bersifat top down dan Bottom Up, sebagaimana pada tabel T-C. 32 berikut ini.

Tabel T-C. 32

### Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sumenep

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
	<b>BELANJA RUTIN</b>				
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran</b>	<b>100,00</b>	
<b>A.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>7</b>	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
<b>A.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>12</b>	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	
<b>A.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	-	
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	
<b>A.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>40</b>	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	7	
			Jumlah item makanan dan minuman yang disediakan	2	
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	
A.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	
A.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142	
A.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	
<b>A.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>2</b>	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	
<b>A.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>3</b>	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000	
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	
<b>A.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU</b>				
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.1</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal</b>	<b>-</b>	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	-	
<b>I.2</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha</b>	<b>-</b>	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>3,79</b>	
<b>II.1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3</b>	
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	<b>3,79</b>	
<b>III.1</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</b>	<b>6.890</b>	
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.890	
III.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15	
III.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	7	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi</b>	<b>6.890</b>	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
IV.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai dengan Izin yang diterbitkan</b>	<b>6.890</b>	
IV.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Sumenep	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	
IV.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30	
IV.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10	
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>93,00</b>	
V.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>100,00</b>	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan

##### *Kebijakan Nasional dan Provinsi*

RKP Nasional pada 2026 mempunyai arah kebijakan yang diusung dengan tema adalah “ *Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif* “, dengan Penekanannya di dalam RKP 2026 lebih difokuskan kepada Kemiskinan, Pengangguran, Kesehatan, Kualitas Sumberdaya Manusia, Pengelolaan Sampah, serta Tata Kelola Pemerintahan. Tahapan pembangunan 2025-2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi, sekaligus menjadi window opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, dokumen RKP 2026 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dan RPJPN 2025-2045, serta penjabaran awal RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai tahap awal pembangunan 5 tahunan. Dokumen RKP 2026 pun akan menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, tema RKP 2026 bakal diwujudkan melalui 3 arah kebijakan prioritas pembangunan. *Pertama*, SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. *Kedua*, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah. *Ketiga*, ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta tata Kelola pemerintahan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Sementara pada RKP 2026 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,3%.

Delapan Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKP adalah; pertama adalah memperkuat ideologi Pancasila, Demokrasi dan Ham. Kedua, memantapkan system pertahanan keamanan negara. Ketiga adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta keempat yaitu peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Kelima adalah reformasi

mental dan pembangunan kebudayaan. Keenam, memperkuat stabilitas polhukan dan transportasi pelayanan public, Ketujuh pembangunan pengentasan kemiskinan, dan kedelapan adalah pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur pada Tanggal 31 Desember 2023. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur pada Tahun 2025-2026 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Jawa Timur berakhir pada Tahun 2024. Selain itu RKPD tahun 2026 harus mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelerasan arah dan tujuan Pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi dan penyelerasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyelerasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 mempunyai tema adalah *“Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”*

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Adapun Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3.2.1  
Tujuan dan Sasaran RENSTRA

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana tabel berikut ini.

RENSTRA			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
TERCAPAINYA PENINGKATAN REALISASI INVESTASI	Prosentase Realisasi Investasi		
		MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI	Nilai Realisasi Investasi

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.2.2  
Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
1.	Stabilisasi Kemandirian Masyarakat dengan menjaga Daya Beli dan Pendapatan Masyarakat melalui pembangunan sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya daya saing investasi	a. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	a. Meningkatnya Realisasi Investasi	a. Nilai Realisasi Investasi

Selanjutnya disajikan hubungan antara Tujuan Perangkat Daerah dengan Sasaran Perangkat Daerah, seperti pada table berikut :

Tabel 3.2.3  
Tujuan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	103,57 %

Tabel 3.2.4  
 Sasaran Perangkat Daerah  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,9 Trilyun

Tabel 3.2.5  
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU Tahun 2026
1.	Tercapainya Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	103,57 %
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,9 Trilyun

### **3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan

- pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,
- top-down dan bottom-up

Rencana program dan kegiatan tahun 2026 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2026.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap rancangan awal RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 direncanakan terdiri atas 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep.

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2026 Kabupaten Sumenep sebagaimana Tabel T-C.33 :

Tabel T-C. 33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026  
dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
Kabupaten Sumenep

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN			5.711.545.658				6.826.380.688	
	<b>BELANJA RUTIN</b>			5.529.861.158				6.334.160.696	
2	181 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		20,00	5.529.861.158		20,00	6.334.160.696	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		20,00			20,00		
2	1801 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		7	2.419.000		9	2.644.300	
2	1812 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	4	1.614.200	APBD	4	1.614.300	
2	1812 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	2	426.600	APBD	2	575.000	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	3	378.200	APBD		3	455.000
2	1	0	2	0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>		<b>12</b>	<b>5.043.879.974</b>			<b>12</b>	<b>5.309.406.754</b>
2	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	36	5.043.879.974	APBD		36	5.309.406.754
2	1	0	2	0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>		<b>40</b>	<b>100.355.000</b>			<b>45</b>	<b>167.401.718</b>
2	1	0	2	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	6	8.827.500	APBD		7	5.497.800
2	1	0	2	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	6	3.954.600	APBD		7	4.349.840
2	1	0	2	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	7	43.930.800	APBD		8	48.570.500
							Jumlah item makanan dan minuman yang disediakan	Kab. Sumenep	3				3	
2	1	0	2	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sumenep	2	5.580.000	APBD		3	6.468.220
2	1	0	2	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sumenep	3	12.780.000	APBD		1	14.058.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumenep	4	9.992.600	APBD		4	10.995.930
2	1	0	2	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	0	0	APBD		136	66.596.200
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	12	15.289.500	APBD		12	10.865.228
2	1	0	2	0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>		<b>3</b>	<b>276.460.104</b>			<b>3</b>	<b>664.385.361</b>
2	1	0	2	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	2000	12.611.400	APBD		2100	5.491.310
2	1	1	2	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	239.909.712	APBD		12	263.900.683
2	1	0	2	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	23.938.992	APBD		12	394.993.368
2	1	0	2	0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah</b>		<b>100</b>	<b>106.747.080</b>			<b>100</b>	<b>190.322.563</b>
2	1	0	2	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sumenep	2	86.447.080	APBD		5	64.784.588
2	1	0	2	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sumenep	25	20.300.000	APBD		35	15.631.000
2	1	0	2	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sumenep	0	0	APBD		2	109.906.975



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Elektronik							
2	1 8 0 5								
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		100	90.967.900			100	33.000.000
2	1 8 0 5	2	0 1						
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		8.800	90.967.900			8.800	33.000.000
2	1 8 0 5	2	0 1 0 6						
		Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	10	90.967.900	APBD		50	33.000.000
2	1 8 0 6								
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		93,00	24.997.500			95,00	21.759.100
2	1 8 0 6	2	0 1						
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100,00	24.997.500			100,00	21.759.100
2	1 8 0 6	2	0 1 0 1						
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	5	24.997.500	APBD		5	21.759.100



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Rencana program dan kegiatan tahun 2026 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2026.

Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja DPMPTSP tahun 2026 telah menggunakan pendekatan money follow program dan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Artinya perencanaan dan penganggaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan arah kebijakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah telah diarahkan sedemikian rupa agar mendukung sasaran prioritas pembangunan tahun 2026. Renja DPMPTSP Tahun 2026 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

#### 4.1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian pelaksanaan Program/Kegiatan yang mendukung terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep dan dijabarkan dalam Sasaran Renstra OPD seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1.  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	3,73	30,64	821,44
2	Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	%	3,73	9,53	255,5
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan nonperizinan	%	87	93,78	107,8

#### 4.2. Prioritas Pembangunan

Keterkaitan Prioritas Pembangunan sesuai dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah terhadap program/kegiatan Perangkat Daerah seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 4.2.  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program/Kegiatan  
Perangkat Daerah Tahun 2026

Prioritas OPD	Uraian Kegiatan	Lokus	Sub Kegiatan Prioritas	Target	Sumber Dana	Prioritas Daerah
1	2	3	4	5	6	7
<b><i>Urusan Bidang Penanaman Modal</i></b>						
P1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sumenep	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8800 pelaku usaha	DAU APBD	Stabilisasi Kemandirian Masyarakat dengan menjaga Daya Beli dan Pendapatan Masyarakat melalui pembangunan sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
P1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan Promosi	DAU APBD	Stabilisasi Kemandirian Masyarakat dengan menjaga Daya Beli dan Pendapatan Masyarakat melalui pembangunan sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
P2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Pengawasan Penanaman Modal	10 kegiatan usaha	DAU APBD	Stabilisasi Kemandirian Masyarakat dengan menjaga Daya Beli dan Pendapatan Masyarakat melalui pembangunan sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
P3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sumenep	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	15 orang	DAU APBD	Stabilisasi Kemandirian Masyarakat dengan menjaga Daya Beli dan Pendapatan Masyarakat melalui pembangunan sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

#### 4.3. Pecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada RENSTRA 2025-2029 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah ditentukan Sasaran dan Indikator Sasaranya, yang merupakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi dengan indikator Nilai Realisasi Investasi.

Capaian Kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel 4.3  
Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai realisasi investasi	Realisasi investasi tahun berjalan	Trilyun Rp	2,5 trilyun	2.745.74 3.557.71 5	Capaian melebihi target Kinerja, dimana Persentase Peningkatan Realisasi Investasi mencapai 30,64%, dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan, akan tetapi setiap tahun realisasi investasi terus mengalami peningkatan sehingga dapat dimaknai bahwa potensi investasi/pejuang investasi/proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep masih dapat memberikan keuntungan yang besar bagi penanam modal

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.  
Sasaran dan Program/Kegiatan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1.	Meningkatnya Iklim Investasi	<p><b>Program :</b> PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub kegiatan :</i> Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p>
2.	Meningkatnya Investor	<p><b>Program :</b> PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i> Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>
3.	Meningkatnya kualitas layanan	<p><b>Program :</b> PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko</li> <li>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko</li> </ul> <p><b>Program :</b> PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i></p>

		<p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya</li> <li>b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</li> <li>c. Pengawasan Penanaman Modal</li> </ol> <p><b>Program :</b> PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> </ol>
--	--	--

Tabel 4.3.2.  
Rekapitulasi Program/Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2026  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
2.	Pemberdayaan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir menjadi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kemandirian ekonomi.	<p><b>Program :</b> PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan : a. Pengawasan Penanaman Modal</p>	<p><b>90.967.900,-</b></p> <p>90.967.900,-</p> <p>90.967.900,-</p>	
3.	Tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif juga menjadi prioritas guna menjamin pelayanan publik yang efektif dan efisien	<p><b>Program :</b> PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan : a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko</p> <p><b>Program :</b> PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan</i></p>	<p><b>65.719.100,-</b></p> <p>65.719.100,-</p> <p>50.804.900,-</p> <p>14.914.200,-</p> <p><b>24.997.600,-</b></p> <p>24.997.600,-</p>	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
		<p><i>yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>  <i>Sub Kegiatan :</i>            a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	24.997.600,-	

Tabel 4.3.3  
Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PAGU INDIKATIF (Rp.)				
						2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>6.120.654.878</b>	<b>6.276.119.511,90</b>	<b>6.347.039.662,38</b>	<b>6.507.619.765,84</b>	<b>6.534.301.006,87</b>
<b>TERCAPAINYA PENINGKATAN REALISASI INVESTASI</b>	<b>PERSENTASE REALISASI INVESTASI</b>	<b>MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI</b>	<b>NILAI REALISASI INVESTASI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>						
				1. Meningkatkan Iklim Investasi	Nilai Investasi	150.000.000	151.500.000,00	153.015.000,00	154.545.150,00	156.090.601,00
				<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>						
				1.1 Meningkatkan pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi insentif dibidang Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi insentif Penanaman Modal	70.000.000	71.500.000	73.015.000	74.545.150	76.090.601
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						
				1.1.1 Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	51.500.000,00	53.015.000,00	54.545.150,00	56.090.601,00

				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						
				1.1.2 Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
				<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>						
				<b>1.2 Tersedianya potensi investasi</b>	<b>Jumlah I-PRO</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						
				1.2.1 Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
				1.2.2 Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>						
				<b>2. Meningkatnya investor</b>	<b>Persentase peningkatan investor</b>	<b>154.998.900</b>	<b>158.935.872,06</b>	<b>160.731.847,41</b>	<b>164.798.363,15</b>	<b>165.474.036,44</b>
				<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						
				<b>2.1 Meningkatnya cakupan promosi investasi</b>	<b>Jumlah calon investor yang mendapatkan promosi investasi</b>	<b>154.998.900</b>	<b>158.935.872,06</b>	<b>160.731.847,41</b>	<b>164.798.363,15</b>	<b>165.474.036,44</b>
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						
				2.1.1 Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	100.000.000	103.936.972,06	105.732.947,41	107.799.463,15	108.475.136,44

				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						
				2.1.2 Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	54.998.900	54.998.900	54.998.900	56.998.900	56.998.900
				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>						
				<b>3. Meningkatkan kualitas layanan perizinan</b>	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM)	<b>125.721.800</b>	<b>128.915.133,72</b>	<b>130.371.874,73</b>	<b>133.670.283,16</b>	<b>134.218.331,32</b>
				<i>Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
				<b>3.1 Meningkatnya ketepatan layanan perizinan</b>	<b>Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan standart</b>	<b>125.721.800</b>	<b>128.915.133,72</b>	<b>130.371.874,73</b>	<b>133.670.283,16</b>	<b>134.218.331,32</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						
				3.1.1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
				3.1.2 Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	60.721.800	63.915.133,72	65.371.874,73	68.670.283,16	69.218.331,32
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan						

				berusaha berbasis risiko						
				3.1.3 Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko						
				3.1.4 Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
				<b>PROGRAM PEGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>						
				<b>4. Meningkatkan iklim investasi</b>	<b>Nilai Investasi</b>	<b>94.999.900</b>	<b>97.412.897,46</b>	<b>98.513.663,20</b>	<b>101.006.058,88</b>	<b>101.420.183,72</b>
				<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>						
				<b>4.1 Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM tepat waktu</b>	<b>94.999.900</b>	<b>97.412.897,46</b>	<b>98.513.663,20</b>	<b>101.006.058,88</b>	<b>101.420.183,72</b>
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						

				4.1.1 Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						
				4.1.2 Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	49.999.900	52.412.897,46	53.513.663,20	56.006.058,88	56.420.183,72
				Pengawasan Penanaman Modal						
				4.1.3 Terlaksananya Analisis dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>						
				5. Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM)	24.997.600	25.632.539,04	25.922.186,73	26.578.018,06	26.686.987,93
				<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal yang dapat Diakses</i>					
				<i>5.1 Meningkatnya ketepatan layanan perizinan</i>	<i>Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai standart</i>	24.997.600	25.632.539,04	25.922.186,73	26.578.018,06	26.686.987,93

				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
				5.1.1 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	24.997.600	25.632.539,04	25.922.186,73	26.578.018,06	26.686.987,93
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
				6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.569.936.678	5.713.723.069,62	5.778.485.090,31	5.927.021.892,59	5.950.410.866,46
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase dokumen perencanaan dan laporan berkualitas	2.468.200	2.530.892,28	2.559.491,36	2.624.246,49	2.635.005,90
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>						
				6.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	2.090.000	2.152.692,28	2.181.291,36	2.246.046,49	2.256.805,90
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
				6.1.1 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra PD	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra PD yang disusun	1.614.000	1.676.692,28	1.705.291,36	1.770.046,49	1.780.805,90
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						

				6.1.2 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
				<b>6.2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian kinerja program Perangkat daerah &gt; 80%</b>	<b>378.200</b>	<b>378.200</b>	<b>378.200</b>	<b>378.200</b>	<b>378.200</b>
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
				6.2.1 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	378.200	378.200	378.200	378.200	378.200
				<b>Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD</b>	<b>Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif</b>	<b>5.567.468.478,0</b>	<b>5.711.192.177,34</b>	<b>5.775.925.598,95</b>	<b>5.924.397.646,10</b>	<b>5.947.775.860,56</b>
				<b>Administrasi keuangan daerah</b>						
				<b>6.3 Meningkatnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase realisasi belanja terhadap anggaran</b>	<b>4.851.721.365,0</b>	<b>4.950.450.000,30</b>	<b>4.985.000.000,80</b>	<b>5.125.000.000,11</b>	<b>5.125.450.000,56</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				6.3.1 Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.851.721.365	4.950.450.000,30	4.985.000.000,80	5.125.000.000,11	5.125.450.000,56
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						

				<b>6.4 Meningkatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan</b>	<b>Persentase layanan kepegawaian yang terselesaikan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
				6.4.1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
				6.4.2 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
				<b>6.5 Meningkatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan</b>	<b>Persentase Kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi</b>	<b>141.883.380,00</b>	<b>143.302.213,80</b>	<b>144.735.235,94</b>	<b>146.182.588,16</b>	<b>147.644.414,76</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				6.5.1 Tersedianya Komponen Instalasi Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.998.000	5.047.980,00	5.098.459,80	5.149.444,00	5.200.938,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				6.5.2 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.954.400	3.993.944,00	4.033.883,44	4.074.222,27	4.114.964,50
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	-	-	-

				6.5.3 Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44.155.000	44.596.550,00	45.042.515,50	45.492.941,00	45.947.871,56
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-	-		
				6.5.4 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.580.200	5.636.002,00	5.692.362,02	5.749.285,56	5.806.778,42
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-	-		-
				6.5.5 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12.780.000	12.907.800,00	13.036.878,00	13.167.246,78	13.298.919,25
				Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	-	-	-
				6.5.6 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.996.300	10.096.263,00	10.197.225,63	10.299.197,886	10.402.189,87
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	-	-
				6.5.7 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.542.000	51.047.420,00	51.557.894,20	52.073.473,14	52.594.207,87
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	-	-	-
				6.5.8 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.877.480	9.976.254,80	10.076.017,35	10.176.777,52	10.278.545,30
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
				<b>6.6 Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan</b>	<b>Jumlah Barang Milik daerah yang disediakan</b>	<b>14.995.000,00</b>	<b>15.044.950,00</b>	<b>15.095.399,50</b>	<b>15.146.353,50</b>	<b>15.197.817,03</b>

				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				6.6.1 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000
				Pengadaan Mebel						
				6.6.2 Tersedianya Mebel untuk Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				6.6.3 Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.995.000	5.044.950,00	5.095.399,50	5.146.353,50	5.197.817,03
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
				<b>6.7 Meningkatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang yang di sediakan</b>	<b>375.848.221</b>	<b>418.022.496,12</b>	<b>444.974.938,42</b>	<b>450.183.697,81</b>	<b>469.815.989,62</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				6.7.1 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.100,00	5.042.021,00	5.092.441,21	5.143.365,622	5.194.799,278
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	-	-	-
				6.7.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	139.909.712,00	141.308.809,12	142.721.897,21	144.149.116,183	145.590.607,345
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	-	-	-
				6.7.3 Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	230.946.409,00	271.671.666,00	297.160.600,00	300.891.216,00	319.030.583,00

				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
				<b>6.8 Meningkatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dan administrasi umum yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan</b>	<b>Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara</b>	<b>173.020.512,00</b>	<b>174.372.517,12</b>	<b>176.120.024,29</b>	<b>177.885.006,53</b>	<b>179.667.638,59</b>
				Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
				6.8.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	58.895.080	59.484.030,80	60.078.871,11	60.679.659,82	61.286.456,42
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-	-	-
				6.8.2 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.210.000	14.352.100,00	14.495.621,00	14.640.577,21	14.786.982,98
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-	-
				6.8.3 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99.915.432	100.536.386,32	101.545.532,18	102.564.769,50	103.594.199,19
				<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>6.120.654.878</b>	<b>6.276.119.511,90</b>	<b>6.347.039.662,38</b>	<b>6.507.619.765,84</b>	<b>6.534.301.006,87</b>



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada Tahun 2026, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2026. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.

2. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
3. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
4. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Agar Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat ditetapkan tepat waktu, berikut ini jadwal penyelesaian dan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 :

#### A. JADWAL PENYELESAIAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2026

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan tim penyusun Rancangan Awal	Desember 2024 – Januari 2025	
2.	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah	Januari 2025	
3.	penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah	Januari 2025	
4.	penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD	Januari - Februari 2025	
5.	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	Minggu II Februari 2026	
6.	Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Ranwal Renja PD	Minggu II – IV Februari 2026	

	berpedoman pada SE Kepala Daerah		
7.	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Minggu IV Februari – I Maret 2026	
8.	Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum PD/Lintas PD	Minggu II Maret 2025	
9.	Verifikasi Renja Perangkat Daerah	Minggu III Maret 2025	
10.	Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Juli 2025	
11.	Penetapan Renja PD	Minggu I Agustus 2025 (1 Minggu setelah Perkada RKPD ditetapkan)	

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dijadikan panduan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 serta Matrik rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2026.

Sumenep, Agustus 2025  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SUMENEP



**Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710125 199503 1 001